

# **PENDIDIKAN MORAL MENURUT L. KOHLBERG DAN RELEVANSINYA BAGI PENDIDIKAN MORAL PANCASILA**

Disertasi ini dipertahankan dalam  
Sidang Terbuka Program Pascasarjana,  
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Doktor dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Sabtu, 8 Juni 2024

Johan Hasan  
NIM: 0640108517  
Program Doktor

Promotor: Prof. Dr. Justinus Sudarminta  
Ko-promotor 1: Prof. Dr. Antonius Sudiarta  
Ko-promotor 2: Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara  
2024

## Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Beberapa survei menunjukkan gagalnya pertimbangan moral dalam masyarakat kita. Misalnya, survei yang dilaporkan dalam buku *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*, menunjukkan 90,16% siswa/ mahasiswa setuju bahwa pengamalan Pancasila dan UUD 1945 sejalan dengan nilai-nilai Islam, juga sebanyak 85% responden setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik. Namun, hanya 55,51% siswa/ mahasiswa yang menyetujui apabila ada rencana pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan mereka tinggal. Sementara, 49% siswa dan mahasiswa yang tidak setuju jika pemerintah harus melindungi penganut Syiah dan Ahmadiyah<sup>1</sup>.

Selain itu, Lembaga Survei Indonesia menunjukkan 82,9% dari masyarakat Muslim di Indonesia sangat sering atau cukup sering mempertimbangkan agama ketika membuat keputusan penting, bahkan menyatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik (76,3%) dan mendukung kebebasan beragama (89,1%). Namun, 30,4% responden berpendapat bahwa pemberian uang/ hadiah untuk memperlancar urusan ketika berhubungan dengan instansi pemerintah (gratifikasi) merupakan hal yang wajar dan 35,2% responden dalam sikap pemakluman masyarakat terhadap tindakan kolusi. Ada 35,6% Muslim keberatan jika non-Muslim mengadakan acara keagamaan di wilayah tinggal mereka dan 48,2% keberatan jika orang non-Muslim membangun tempat peribadatan di wilayah mereka, 47,4% Muslim keberatan jika non-Muslim menjadi bupati/ walikota, 48,2% untuk menjadi gubernur, 49,6% menjadi wakil presiden dan 53,2% menjadi presiden<sup>2</sup>.

Mengutip temuan survei Setara Institute terbaru yang menunjukkan adanya 83,3% siswa SMA yang menyatakan Pancasila bisa diganti serta meningkatnya sikap anti-perbedaan dan

- 
- 1 Yunita Faela Nisa et al., *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*, ed. Didin Syafruddin and Ismatu Ropi (Jakarta: PPIM-UIN Jakarta, 2018). h.13,83, 103.
  - 2 Yudha Sugiarto, "Korupsi, Religiusitas, dan Intoleransi: Temuan Survei Nasional 16-22 Agustus 2017," <https://www.lsi.or.id/post/rilis-temuan-survei-nasional>.

keberagaman di kalangan siswa SMA maka Darmansjah Djumala selaku Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menunjukkan bagaimana pemerintah sudah mengembalikan mata kuliah Pancasila menjadi mata pelajaran wajib melalui PP No.4/2022, menghadirkan BPIP dan menuntaskan bahan ajar Pancasila.<sup>3</sup> Demikian juga bergulir keinginan mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila seperti yang dikemukakan Prof. Unifah Rosyidi sebagai Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).<sup>4</sup> Maka, jika Pendidikan Moral Pancasila dihadirkan, bagaimana Pancasila mengatasi kecenderungan relativisme moral, bagaimana hubungan moral Pancasila dengan agama dan akhirnya bagaimana metode pendidikan moral Pancasila itu seharusnya untuk menghasilkan manusia yang kritis, dapat bertindak adil dan berkebaikan serta semakin dewasa secara moral. Demikian, penulis melihat Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg relevan dan memiliki sumbangan yang berharga dalam tiga hal ini.

## 2. Rumusan Masalah

Mengapa Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg tetap relevan dan memiliki sumbangan yang berharga bagi upaya memahami Pancasila dan merumuskan model pendidikan moral Pancasila, khususnya pada tingkat Perguruan Tinggi di tengah konteks agama dan budaya yang majemuk dari peserta didik? Dengan itu, akan dijawab juga beberapa pertanyaan berikut. Apa isi pokok teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg? Apa tujuan pendidikan moral Kohlberg dan apa saja model yang digunakannya? Apa relevansi pemikiran Kohlberg bagi Pancasila dan Pendidikan Moral Pancasila? Apa kritik pokok yang sering dikemukakan terhadap pemikiran Kohlberg dan model pendidikannya? Apa

---

3 Darmansjah Djumala, "Memudakan Aktualisasi Pancasila," *kompas.id*, May 30, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/05/30/memudakan-aktualisasi-pancasila>.

4 Dhita Seftiawan, "Ketua Umum PGRI: Mata Pelajaran Moral Pancasila Harus Menyenangkan - *www.Pikiran-Rakyat.com*," *Pikiran-Rakyat.com*, accessed October 22, 2023, <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01342842/ketua-umum-pgri-mata-pelajaran-moral-pancasila-harus-menyenangkan>.

sumbangan dan keterbatasan pendidikan moral Kohlberg bagi Pendidikan Moral Pancasila pada tingkat perguruan tinggi di Indonesia? Apa kesimpulan pokok yang dapat ditarik dari kajian disertasi ini dan dimana letak kebaruan sumbangannya serta keterbatasannya?

### 3. Tujuan

Melalui pengkajian teori perkembangan kognisi moral dan pendidikan moral Kohlberg, penulis dapat menghasilkan dasar bagi Pendidikan Moral Pancasila dengan menghindari reduksi pendidikan moral sebagai pendidikan agama di satu pihak, dan juga menghindari bahaya jatuh pada relativisme moral ataupun absolutisme moral keagamaan di lain pihak, sembari tetap memperhatikan kemungkinan penerapan dalam konteks Indonesia.

### 4. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian literatur. Walaupun penelitian Kohlberg memuat banyak penelitian empiris, namun penelitian ini terbatas pada kajian terhadap kepustakaan tulisan-tulisan Kohlberg dan rekan-rekannya serta para pengkritiknya.

Sejak disertasinya yang dapat dipertahankannya tahun 1958, Kohlberg terus mengembangkan dan memvalidasi penelitian longitudinalnya selama dua puluh tahun lebih. Berbagai tanggapan dan kritik juga diadakan terhadap teorinya. Bahkan ketika bukunya, *Essays on Moral Development Volume I, The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice* terbit tahun 1981, pada waktu yang sama Kohlberg dan rekan-rekannya sedang melakukan revisi terhadap teorinya. Revisi pemikirannya kemudian muncul dalam monograf yang terbit tahun 1983 dan kemudian ditambahkan juga pada buku antologi ke-2 berjudul *Essays on Moral Development Volume II, The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages*, yang terbit tahun 1984. Proses revisi yang cukup komprehensif juga dituangkan dalam buku Kohlberg kemudian berjudul, *The Measurement of Moral Judgement Volume I, Theoretical Foundations and Research Validation* (1987)

dan *The Measurement of Moral Judgement: Volume 2, Standard Issue Scoring Manual* (1987).

Akhirnya, Kohlberg, Boyd, Levine juga melakukan tinjauan ulang terhadap tahap 6-nya melalui tulisan, "*The Return of Stage 6: Its Principle and Moral Point of View*" dalam konferensi oleh Max Planck Institute tahun 1984 di Jerman yang kemudian terbit dalam buku Thomas E. Wren (ed) *The Moral Domain, Essays in the Ongoing Discussion Between Philosophy and the Social Science* pada tahun 1990, setelah meninggalnya Kohlberg pada tanggal 17 Januari 1987. Tentu, penting untuk dilihat juga bagaimana Kohlberg menerapkan teori perkembangan moralnya pada praktek pendidikan moral melalui komunitas adil dan peduli dalam buku *Lawrence Kohlberg's Approach to Moral Education* yang ditulisnya bersama F. Clark Power dan Ann Higgins dan terbit secara anumerta tahun 1989.

Dengan demikian, penelitian ini merujuk pada beberapa pemikiran akhir dari Kohlberg terkait pembelaannya pada universalisme moral, hubungan moral dengan agama ataupun budaya, serta pendidikan moral dari Kohlberg yang penulis harapkan akan berguna pada pemahaman Pancasila dan Pendidikan Moral Pancasila. Tentu, dalam filsafat yang juga mengutamakan pemikiran kritis, apa yang menjadi keterbatasan pemikiran Kohlberg sendiri perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, penelitian literatur ini juga memuat beberapa kritik terhadap Kohlberg untuk melihat keterbatasan pemikirannya, yang juga merupakan peluang bagi pengembangan penelitian lebih lanjut.

Lawrence Kohlberg (1927-1987) lahir 25 Oktober 1927 di Bronxville, New York dari keluarga berada. Namun, Kohlberg muda, selepas sekolah menengah atasnya memilih berpetualang kerja di Merchant Marine dan juga kemudian kapal kargo Paducah, pada akhir perang dunia II yang membawanya ke Eropa. Di sana, ia menyaksikan langsung kerusakan dan penderitaan yang diakibatkan *Holocaust*. Sekembalinya ia di Amerika Serikat, ia mengambil pendidikan sarjananya di Universitas Chicago yang diselesaikan hanya dalam setahun (1949), tetapi kemudian butuh sembilan tahun menyelesaikan pendidikan doktoralnya (1958). Sejak tahun 1968,

Kohlberg diangkat menjadi guru besar di pascasarjana Universitas Harvard, dan kemudian tahun 1974, ia mendirikan Center for Moral Development and Education hingga meninggalnya tahun 1987. Wiel Veugelers dan Fritz Oser dalam pengantar buku Kohlberg Revisited menyatakan, "Tidak ada yang melebihi Lawrence Kohlberg dalam mempengaruhi riset dan pemikiran tentang perkembangan moral dan pendidikan moral dalam abad 20."<sup>5</sup>

## 5. Tesis

Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg kendati sudah cukup lama dirumuskan dan memiliki keterbatasan, dewasa ini masih tetap relevan dan memberi sumbangan yang berharga bagi upaya menginterpretasikan Pancasila dan merumuskan model pendidikan moral Pancasila di tengah konteks masyarakat yang majemuk.

## Kerangka Teoretis

### 1. Teori Perkembangan Moral Kohlberg

Perhatian Kohlberg terhadap pentingnya pendidikan moral merupakan respons dirinya terhadap Holocaust, yang menurutnya peristiwa besar tetapi gagal memancing rasa keadilan pada banyak individu dan masyarakat<sup>6</sup>. Kohlberg menyatakan tahap-tahap pertimbangan moralnya merupakan pencarian dirinya terhadap moralitas universal. Dengan dasar apa kita menyatakan Hitler bersalah sementara hukum dan masyarakat kebanyakan saat itu tampaknya mendukung tindakan Hitler?

Kohlberg mengajukan tiga model perkembangan moral yakni 1) tahap pertimbangan moral yang didalamnya terdiri atas tiga tingkat (levels) dengan tiga perspektif sosiomoralnya yakni tingkat prakonvensional dengan perspektif individual konkrit, konvensional dengan perspektif anggota dari masyarakat dan pascakonvensional dengan perspektif mendahului masyarakat (*prior-to-society*

---

5 Wiel Veugelers and Fritz Oser, "Foreward," in *Kohlberg Revisited*, ed. Boris Zizek, Detlef Garz, and Ewa Nowak (Springer, 2015). h.vii

6 Lawrence Kohlberg, *Essays on Moral Development. Volume I: The Philosophy of Moral Development*, First Edition (San Francisco: Harper & Row, 1981). h.407

*perspective*). Masing-masing tingkat memiliki dua tahap, sehingga keseluruhan terdapat enam tahap pertimbangan moral yakni Tahap 1 Moralitas Heteronom, Tahap 2 Moralitas Instrumental, Individualistik, Tahap 3 Moralitas Normatif Interpersonal, Tahap 4 Moralitas Sistem Sosial, Tahap 5 Moralitas Kontrak Sosial dan hak-hak individual, Tahap 6 Moralitas berdasarkan prinsip-prinsip etis universal dan reversibel. 2) Tipe moral yakni heteronom dan otonom. 3) Tahapan komunitas dan budaya moralnya.

Tahapan-tahapan perkembangan moral Kohlberg adalah tahapan penalaran keadilan, bukan emosi, aspirasi ataupun aksi<sup>7</sup>. Kohlberg tidak menolak bahwa afeksi bagian integral dari pertimbangan ataupun penalaran keadilan. Sebaliknya, Kohlberg menyatakan, teorinya mengenali afeksi yang mendorong orang untuk peduli dan bertanggung jawab. Afeksi, baginya, dimediasi melalui proses kognitif seperti tukar-peran (*role taking*), atau meletakkan diri pada posisi orang lain dan dapat diwujudkan dalam simpati kepada korban, marah kepada pengeksploitasi moral atau peduli dan mengambil tanggung jawab. Namun, tahapan Kohlberg didasarkan pada penalaran keadilan. Pada tahap 6 Kohlberg meyakini ada prinsip moral universal yang dapat dipegang seseorang lintas pelbagai budaya dan masyarakatnya.

Walau bukan penilaian atas aksi, Kohlberg akan melihat relasi yang kuat antara “penalaran moral” dengan “tindakan moral”. Menurut Kohlberg, semakin tinggi tahapan moral seseorang, semakin mungkin tindakannya akan lebih konsisten dengan pilihan moral yang ia buat dalam dilema moral. Ia pun menunjukkan bahwa adanya tahapan moral yang sama dalam setiap kebudayaan, lintas agama dan gender serta prinsip moral keadilan dan kebaikan adalah universal dan reversibel.

Kohlberg mampu menjelaskan mengapa seorang Adolf Eichmann, pejabat Partai Nazi Jerman yang juga salah satu pimpinan operasional Holocaust, taat hukum dan negara, taat beragama dan

---

7 Lawrence Kohlberg, Charles Levine, and Alexandra Hewer, “The Current Formulation of the Theory,” in *Essay on Moral Development Volume II The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages*, First Edition (San Francisco: Harper & Row, 1984). h. 68

bersumpah menyatakan dirinya tidak bersalah atas nama Tuhan, kagum dengan tokoh Hitler, berpendidikan tinggi, tetapi ternyata melakukan ketidakadilan. Dari pelbagai jawaban dan argumentasi Eichmann dalam pengadilan di Yerusalem tahun 1961, Kohlberg menilai kebanyakan jawaban berkisar pada tahapan 1 dan 2 dan sedikit 3<sup>8</sup>.

Selain tahapan moral, Kohlberg juga menambahkan apa yang disebutnya tipe moral, merevisi temuannya yakni dalam satu tahap bisa saja terdapat dua tipe moral yang berbeda yakni tipe moral B (otonom) dan tipe moral A (heteronom). Apa manfaatnya mengenali tipe moral ini?

Stanley Milgram (1933-1984) merancang eksperimen, tiga bulan setelah pengadilan Adolf Eichmann, pada tanggal 7 Agustus 1961 terhadap 40 laki-laki berumur 20 – 50 tahun dengan latar belakang pekerjaan dan tingkat pendidikan yang berbeda. Penelitian Milgram berusaha menjawab, “Apakah mungkin Eichmann dan jutaan kaki tangannya hanya mengikuti perintah?” Para subjek penelitian diperintahkan memberikan kejutan listrik (yang sebenarnya palsu) kepada korban, dengan hasil ternyata setiap peserta tetap melanjutkan kejutan listrik pada 300 Volt sementara 65% tetap melanjutkan memberikan kejutan listrik ketika 450 Volt.

Kohlberg melakukan analisis ulang lebih detail terhadap percobaan ini dan menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Pada penelitian Kohlberg terhadap eksperimen Milgram, ia menemukan subjek-subjek penelitian pada tipe moral B (otonom) lebih bisa menyatakan 'stop' untuk tidak meneruskan kejutan listrik pada korban dalam eksperimen dibandingkan tipe moral A (heteronom). Ini sekaligus juga menjelaskan mengapa Eichmann dan kebanyakan orang Jerman saat itu tunduk dan akan melakukan apa yang diperintahkan negara atau pimpinan. Kebanyakan mereka berada dalam tahap konvensional atau ke bawah serta heteronom sehingga akan cenderung tunduk pada perintah. Ini juga menjelaskan mengapa

---

8 Lawrence Kohlberg, *Essays on Moral Development. Volume II: The Psychology of Moral Development*, First Edition (San Francisco: Harper & Row, 1984), h. h. 54-55

penting tahapan komunitas ataupun suasana moral ketika keputusan diambil.

Sementara pada penelitian Kohlberg secara longitudinal terhadap subjek-subjek penelitian di Israel, Amerika Serikat, Turki dan Taiwan, kedua negara subjek penelitian yang dianggap mewakili budaya Barat biasanya adalah Amerika Serikat dan Israel, sementara Turki dan Taiwan dianggap mewakili budaya non-Barat karena budaya masyarakatnya yang hormat dan memberikan otoritas pada yang lebih tua. Namun ternyata ditemukan jumlah tipe moral A dari Amerika Serikat sama banyaknya dengan Turki dan Taiwan.

Hanya peserta dari kibbutz Israel yang menunjukkan lebih banyak tipe moral heteronom (B). Ini bisa dijelaskan oleh Kohlberg karena di kibbutz Israel mereka sangat menghargai kesucian hidup (*sanctity of life*) sementara hak milik individu bukan nilai utama di dalam kibbutz. Di kibbutz sendiri, struktur dan relasi sosial sangat didasarkan pada kesetaraan, kerja sama dan saling menghormati daripada struktur dan relasi sosial kelompok lainnya. Dengan demikian, suasana moral (*moral atmosphere*) mempengaruhi tindakan moral sesuai dengan tipe moral dan tahapan moral. Demikian juga ini menjelaskan apa yang terjadi pada Jerman ketika Hitler berkuasa. Kohlberg kemudian menyadari pentingnya menentukan suasana moral dalam pendidikan melalui komunitas dan juga mengadakan pengukuran terhadapnya.

Demikian, kita melihat tahapan moral dan tipe moral serta keberadaan tahapan budaya moral, menjadi struktur perkembangan moral Kohlberg dengan sudut pandang moral pada tahap 6 yang didasarkan pada prinsip hormat kepada sesama (*respect for person*). Kohlberg menyebutkan interpretasi positif dari kaidah emas yakni "Perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin mereka berbuat kepadamu" mengekspresikan kebaikan (*benevolence*) yang dielaborasi dalam maksim Kristen yaitu cinta sesamamu seperti dirimu sendiri, sementara interpretasi negatif dari kaidah emas yakni "Jangan berbuat kepada orang lain sebagaimana kamu tidak ingin orang lain berbuat kepadamu" mengekspresikan keadilan (*justice*). Kedua prinsip kebaikan dan keadilan ini dapat saja menghasilkan

ketegangan satu sama lain tetapi juga saling mendukung dan dikoordinasikan dalam tahap 6. Bagi Kohlberg prinsip kebaikan dan keadilan ini adalah universal dan reversibel.

## 2. Pendidikan Moral Kohlberg

Mengikuti pembagian Snarey dan Samuelson, ada tiga metode pendidikan moral Kohlberg yakni Keteladanan Moral (*moral exemplar*), Diskusi Dilema Moral dan Komunitas Adil (*just community*)<sup>9</sup>.

Terkait mereka yang masuk dalam keteladanan moral menurut Kohlberg, Snarey dan Samuelson mendafarkan 12 tokoh teladan: Martin Luther King Jr., Socrates, Abraham Lincoln, Marcus Aurelius, Janusz Korczak (nama aslinya Henryk Goldszmit), Thomas More, Andrea Simpson, Baruch Spinoza, Henry David Thoreau, juga orang yang pernah ditemui Kohlberg langsung yakni Joan, Hakim Brennan dan Archibald Cox<sup>10</sup>, serta ada tiga tambahan tokoh yang sebenarnya disebut oleh Kohlberg tetapi tidak dalam daftar Snarey dan Samuelson yakni Mahatma Gandhi, Mother Teresa dan Dag Hammarskjold<sup>11</sup>. Kesemua tokoh menunjukkan bahwa mereka hidup sesuai prinsip moral universal dan dalam tindakan nyata, bahkan berani melawan arus atau status quo dengan risiko kematian ketika menjalani prinsip moral universalnya. Mereka datang dari pelbagai agama, kebudayaan, gender dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Walau mereka masuk dalam teladan moral, tetap mereka juga manusia biasa yang adalah anak zamannya dan tidak sempurna. Kohlberg sendiri menyatakan para pendidik adalah seorang pendidik moral, suka atau tidak suka.<sup>12</sup> Untuk itu, seorang pendidik senantiasa

---

9 John Snarey and Peter L. Samuelson, "Lawrence Kohlberg's Revolutionary Ideas, Moral Education in the Cognitive-Developmental Tradition," in *Handbook of Moral and Character Education*, ed. Larry P. Nucci, Tobias Krettenauer, and Darcia Narváez, Second Edition, Educational Psychology Handbook (New York: Routledge, 2014). h.73-79

10 Snarey and Samuelson. h. 74

11 Kohlberg, *The Philosophy of Moral Development*. h.342

12 Ann Higgins D'Alessandro, "Lawrence Kohlberg's Legacy: Radicalizing The Educational Mainstream," in *Kohlberg Revisited*, ed. Boris Zizek, Detlef Garz, and Ewa Nowak (Springer, 2015), 27-49. h.30

berusaha hidup memenuhi keadilan dan cinta kasih, menjadi anggota dari komunitas keadilan dan peduli.

Melalui penelitian Moshe Blatt, juga Colby, Kohlberg, Fenton, Speicher-Dubin dan Lieberman, peserta didik yang melakukan diskusi dilema moral secara rutin menunjukkan kemajuan dalam tahap perkembangan moral dibandingkan yang tidak. Tentu ini dengan catatan mereka dihadapkan pada penalaran moral satu tahap atau paling jauh dua tahap di atas mereka, berinteraksi dan partisipasi dalam diskusi dengan rekan sebaya mereka, intervensi yang tidak singkat (untuk 1-6 sesi tidak ada peningkatan yang signifikan) dengan dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan kritis untuk menawarkan solusi dan keadilan pada persoalan dilema moral yang ada.

Dari pengalaman kunjungannya pada kibbutz tahun 1969 dan 1971, serta pembacaan ulangnya terhadap karya Durkheim dan juga pengaruh keteladanan Janusz Korczak (nama aslinya Henryk Goldszmit), Kohlberg makin menyadari pentingnya satuan pendidikan dalam kelompok. Itu kemudian melakukan pendidikan komunitas adil (terkadang disebut komunitas adil dan peduli) dimana peserta didik terlibat secara penuh dalam keputusan dan tindakan bersama secara demokratis. Setiap anggota dalam sekolah bersama-sama menentukan hak dan tanggung jawab bersama, dengan tetap mendasarkan hormat terhadap sesama, mengembangkan keterikatan pada kelompok melebihi diri dan menanamkan tanggung jawab kolektif untuk tindakan setiap anggota kelompok.

Mengapa pendekatan pendidikan keteladanan moral dan diskusi dilema moral tidak cukup? Kohlberg melihat dari dua penelitian yakni James Coleman<sup>13</sup> yang menunjukkan bahwa munculnya perilaku remaja di sekolah menengah Amerika banyak dipengaruhi oleh teman-teman kelompoknya yang menentukan iklim sosial dalam sekolah daripada oleh guru ataupun staf sekolah. Demikian juga penelitian Bronfenbrenner<sup>14</sup> yang membandingkan

---

13 James S. Coleman, *The Adolescent Society: The Social Life of the Teenager and Its Impact on Education*, Reprint Edition 1981 (Westport, Conn: Praeger, 1961). h.

14 Urie Bronfenbrenner, "Response to Pressure from Peers Versus Adults Among Soviet and American School Children1," *International Journal of Psychology*

remaja di Uni Soviet dengan remaja Amerika dan Inggris, menunjukkan bagaimana remaja Amerika dan Inggris lebih suka bersama kelompoknya untuk melakukan kecurangan, menelantarkan teman yang sakit dan melanggar aturan orangtuanya. Sementara itu, remaja Uni Soviet juga lebih suka bersama kelompoknya tetapi melakukan hal yang sebaliknya.<sup>15</sup>

Masalah lain, menurut Kohlberg kita tidak bisa menunggu siswa-siswa mencapai tahap kelima, agar bisa langsung menangani perilaku moral seperti pencurian, kecurangan, dan agresi yang terjadi pada sekolah. Rupanya pendidikan demokratis bisa dijalankan melalui komunitas adil dan tidak ada kontradiksi untuk menolong siswa dalam memulai moralitas konvensional ketika ia memang sedang berjuang pada tahap tersebut sambil mempertahankan pencapaian akhir penalaran moral tahap enam yang berprinsip sebagai tujuan akhir siswa. Pendekatan komunitas juga memberikan motivasi eksternal untuk bertindak, yang menurut Durkheim adalah keterikatan pada kelompok (*attachment to the group*), suatu ikatan afektif antara individu dan rekan-rekannya yang memimpin individu untuk memenuhi harapan kelompok<sup>16</sup>.

Siswa perlu belajar memahami adanya aturan-aturan yang sudah disepakati bersama untuk tidak boleh dilanggar dan menaruh hormat pada aturan tersebut dan tidak buru-buru mendorong otonomi moral pada siswa yang akan mengakibatkan ketidakstabilan pada dasar perkembangan moralnya. Kohlberg melihat hormat pada aturan tidak perlu dilihat sama seperti kesetiaan buta Eichmann pada aturan dari otoritas yang lebih tinggi, tetapi merupakan hormat dan setia kepada perjanjian yang siswa buat bersama kelompoknya dan para pendidiknya<sup>17</sup>. Ketika kepercayaan siswa terhadap sistem moral sekitarnya goyah, adalah penting untuk melibatkan siswa dalam

---

2, no. 3 (1967): 199–207, <https://doi.org/10.1080/00207596708247216>.

15 F. Clark Power, Ann Higgins, and Lawrence Kohlberg, *Lawrence Kohlberg's Approach to Moral Education*, First Edition (New York: Columbia University Press, 1989). h. 37

16 Power, Higgins, and Kohlberg. h. 57

17 Power, Higgins, and Kohlberg. h. 55

pembuatan sistem moral konvensional yang dapat mereka percaya berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kesepakatan komunitas.

Dari perspektif perkembangan tahapan, pada tahap 2 dan 3, siswa belajar untuk menjaga dan hormat pada aturan yang berlaku di kelas yang mereka kunjungi, menyelesaikan tugas sekolah, menjaga komitmen, tidak ada pencurian barang, dan keadilan tidak dilanggar. Namun demikian, siswa bukan diajarkan bahwa aturan sosial dan otoritas menentukan apa yang benar dan adil tetapi sebaliknya bahwa benar dan adil membutuhkan aturan sosial dan otoritas. Siswa diajarkan untuk menggunakan kapasitas penalaran moral yang mereka miliki untuk berpikir seperti apa aturan dan otoritas itu seharusnya dan bagaimana sebagai anggota kelompok, ia harus bertanggung jawab untuk berkontribusi bagi terjaganya aturan dan otoritas. Dengan demikian, sebenarnya pengembangan otonomi siswa dapat terjadi karena mereka melihat kebaikan dari aturan yang ada dan karenanya memiliki kewajiban untuk mengikuti otoritas aturan atau ketertiban yang ada.

Sementara dari perspektif demokratis, seluruh peserta diharapkan dapat menggunakan penalaran moral sebagai kebebasan, siswa perlu memahami dan dapat memberikan persetujuan, juga dapat melakukan kritik tanpa harus terancam. Norma sosial dan juga otoritas ini adalah cara pengendalian paling efektif dan tidak dirasakan sebagai paksaan dari luar, karena individu sendiri meyakini itu, terlibat dan ikut memiliki aturan sosial tersebut.

Pendekatan komunitas adil ini juga memenuhi tindakan yang konsisten dan dapat diandalkan terhadap moralitas yang menentukan, memastikan dan mengatur perilaku seseorang sebagai kewajiban reguler dan habitual. Seperti pendapat Durkheim, ia juga membantu kita menetapkan batas-batas, membebaskan kita dari kebutuhan merancang setiap solusi untuk setiap situasi dan memenuhi tuntutan moral berdasarkan ciri khas individu. Otoritas hanya dibutuhkan untuk menahan kekuatan yang memberontak, tetapi membebaskan

individu untuk membatasi dirinya sendiri demi menghadapi lingkungannya<sup>18</sup>.

Hasil penelitian Power, Higgins, Kohlberg dan Berkowitz menunjukkan terjadinya perubahan tahapan moral yang signifikan pada peserta didik, tanggung jawab sosial lebih besar pada sekolah komunitas adil dibandingkan sekolah tradisional, meningkatnya kerja sama antar-ras dan minat belajar, termasuk berkurangnya beberapa permasalahan kenakalan remaja di sekolah: kecurangan, masalah obat terlarang, perkelahian rasial<sup>19</sup>.

## **Analisis, Hasil dan Pembahasan**

### **1. Universalitas perjuangan kemerdekaan dan Pancasila**

Kohlberg mengakui adanya prinsip moral yang universal dan reversibel. Ia juga menawarkan salah satu cara menguji ciri universal dan reversibel dengan apa yang disebutnya 'kursi-kursi musik moral' (*moral musical chairs*), suatu penerapan kaidah emas tatanan kedua (*second order golden rule*). Skenario ini mendorong agar setiap orang membayangkan dirinya pada banyak posisi dengan setiap orang di dalam dilema, memodifikasinya hingga tersisa satu solusi yang bisa disetujui setiap peran, sebelum ia menyatakan bahwa pendapatnya berkeadilan.

Dari pandangan Kohlberg ini, dapat kita bedakan mana yang merupakan perjuangan yang didasarkan pada keadilan dan kebaikan yang universal dan mana yang tidak. Sebagai contoh, tulisan R.M. Soewardi Soerjaningrat tahun 1913 berjudul *Als Ik Eens Nederlander Was*, menunjukkan kemerdekaan adalah nilai universal sama seperti yang kita rumuskan kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa, sementara kolonialisme dan imperialisme tidak memenuhi kaidah

---

18 Emile Durkheim, *Moral Education, A Study Theory and Application of the Sociology of Education*, trans. Everett K. Wilson and Herman Schnurer (New York: The Free Press, 1961), h. 130

19 F. Clark Power et al., "Individual Moral Development as an Outcome of Democratic Schooling," in *Lawrence Kohlberg's Approach to Moral Education*, First Edition (New York: Columbia University Press, 1989), 266–97.

emas. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri memuat beberapa hak-hak asasi manusia sebelum hadirnya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948. Demikian juga, Sukarno pada 18 April 1955 di Konferensi Asia-Afrika menyatakan tuntutan moral bagi perdamaian, dan menawarkan Pancasila bagi dunia dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Demikian, Pancasila seharusnya dimaknai secara universal dan reversibel lintas pelbagai agama dan budaya yang berbeda di dunia. Maka seperti yang digariskan Kohlberg, potensi setiap bangsa, agama dan budaya melahirkan nilai moral yang universal dan reversibel sangat dimungkinkan.

## 2. Penerapan moral yang universal dan reversibel pada Pancasila.

Survei-survei di awal permasalahan menunjukkan kegagalan pemaknaan moral Pancasila yang universal dan reversibel. Namun, dalam sejarah pun, misalnya dalam sidang BPUPK, ketika Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal "Presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam", maka pendapat Soekardjo Wirjopranoto yang adalah juga beragama Islam dalam rapat itu menunjukkan penerapan moral universal dan reversibel. Ia menyatakan keadilan tentu mendapat perlindungan dari agama Islam dan pasal tersebut justru bertentangan dengan "segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan." Ia juga menambahkan pasal itu akan menimbulkan adanya kelas-kelas dalam negara Indonesia serta mengakibatkan putera-puteri Indonesia yang bukan beragama Islam, walau bijaksana, tinggi budinya dan pandai, serta giat, sudah dipagari tidak bisa menjadi Presiden Indonesia. Soekardjo juga mengusulkan istilah "bangsa Indonesia asli" menjadi "bangsa Indonesia" saja dengan membuang kata asli.<sup>20</sup>

Argumen serupa ditunjukkan oleh Abdurrahman Wahid, menanggapi keinginan mengembalikan Piagam Jakarta dalam pasal 29 UUD kita yang akan mengakibatkan warga negara non-muslim sebagai warga negara kelas dua.

---

20 RM. A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Edisi Revisi (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009). h. 422 dan 398

### 3. Tahap 7 Metaforis dan Moral Pancasila

Roeslan Abdulgani sudah menunjukkan bahwa negara Pancasila itu bukan negara teokrasi tetapi itu tidak berarti negara dan agama terpisah sama sekali.<sup>21</sup> José Casanova menyatakan sekularisasi datang dalam bentuk tiga jenis yakni sekularisasi dengan mundurnya agama (*secularization as religious decline*), sekularisasi sebagai privatisasi agama (*secularization as privatization*) dan sekularisasi sebagai diferensiasi (*secularization as differentiation*).<sup>22</sup> Maka, Yudi Latief menyatakan bahwa Indonesia dengan Pancasila mendapatkan pembenaran dari teori kontemporer ini, yakni menolak tesis "*separation*" dan "*privatization*" tetapi mendukung tesis "*differentiation*" yakni peran agama dan negara tidak perlu dipisahkan tetapi dibedakan dengan syarat keduanya memahami batas otoritas masing-masing.<sup>23</sup>

Kohlberg, jauh sebelum buku José Casanova terbit, sudah menunjukkan bahwa agama dan moral dua hal berbeda, tetapi tidak terpisah. Pada sisi lain, kontribusi dan peran agama diharapkan pada ranah moral untuk mewujudkan kemanusiaan. Namun, di sisi lain, Kohlberg juga menunjukkan bahaya mereduksi ranah moral kepada agama. Dalam penelitiannya, Kohlberg menunjukkan tidak ada perbedaan perkembangan moral seseorang terkait agama tertentu. Anak-anak Kristen Protestan, Katolik, Islam, Yahudi, Budha bahkan ateis sekalipun melewati tahapan yang kira-kira sama ketika kelas sosial dan perbedaan desa-kota dijaga sama.<sup>24</sup>

Kohlberg menolak pendidikan moral direduksi pada pendidikan agama. Kohlberg menolak pendekatan teori perintah ilahi (*divine command theory*), yakni suatu tindakan bermoral jika diperintahkan kitab suci. Menurutnya, ada banyak aturan moral

---

21 Roeslan Abdulgani, "Pidato Sdr. Roeslan Abdulgani Dalam Konstituante: Bandung, 3 Desember 1957," in *Capita Selecta Revolusi Indonesia Jilid I: Bahan-bahan Indoktrinasi*, ed. A. Rachim (Jember: Sumber Ilmu, 1961). h. 52

22 José Casanova, *Public Religions in the Modern World* (Chicago: The University of Chicago Press, 1994). h.7

23 Yudi Latief, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). h. 43

24 Kohlberg, *The Philosophy of Moral Development*. h. 303, 123

agama yang tidak universal dan reversibel seperti "adalah salah menerima transfusi darah" (kasus Saksi Jehovah) atau "adalah salah bekerja di hari Minggu" (pandangan beberapa orang Kristen) dan sebagainya. Karena itu, Kohlberg menyatakan pendidikan moral di sekolah sebaiknya didasarkan pada prinsip moral universal yang dapat dikenali oleh akal budi dan tidak bergantung pada agama atau wahyu tertentu.<sup>25</sup>

Namun di sisi lain, Kohlberg merujuk pada satu tahap yang metaforis, dan tentu bukan lanjutan dari tahap 6, suatu tahap yang dia anggap sebagai yang menjawab pertanyaan mengapa bermoral dan juga mengapa komitmen pada pendidikan moral. Untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kohlberg melihat itu ada dalam wilayah tahap 7 yang adalah wilayah filsafat agama dan etika. Bagi Kohlberg, agama sesungguhnya menawarkan jalan untuk menerima realitas sebagai yang paling dapat dipercaya, di tengah ambiguitas moral ideal dan kenyataan, akibat kehadiran penderitaan, ketidakadilan dan juga kematian. Justru dari sikap agama dan komitmennya, kita dapat menerima kewajiban kita bermoral, walau harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak menguntungkan.<sup>26</sup>

Ernest Wallwork menyatakan prinsip moral dasar ini dimiliki oleh mereka yang percaya Tuhan atau ateis. Namun, keuntungan orang beragama adalah selain alasan moral, mereka juga memiliki alasan agama untuk menerima prinsip moral ini, sementara mereka yang ateis hanya punya pembenaran moral semata.<sup>27</sup> Sementara dari pemikiran Kohlberg, James Fowler melihat tahapan iman mengandaikan tahapan moral, sehingga agama seharusnya mendukung prinsip moral tertinggi dengan kemampuannya

---

25 Kohlberg. h. 311, 313, 316

26 Lawrence Kohlberg and Clark Power, "Moral Development, Religious Thinking, and the Question of a Seventh Stage," in *Essays on Moral Development. Volume I: The Philosophy of Moral Development*, First Edition (San Francisco: Harper & Row, 1981). h. 322

27 Ernest Wallwork, "Morality, Religion, and Kohlberg's Theory," in *Moral Development, Moral Education, and Kohlberg*, ed. Brenda Munsey (Birmingham, Alabama: Religious Education Press, 1980). h. 287

menunjukkan keadilan dan kebaikan lintas agama dan golongan.<sup>28</sup> Singkatnya, untuk beragama yang baik, perlu memiliki moral yang baik dan agama tentu dapat berkontribusi dalam hal ini. Sebaliknya moral universal ini dapat menanggapi secara kritis tindakan beragama yang melanggar aspek moral ini.

#### 4. Moral Pancasila

Melalui wirama Ki Hajar Dewantara, yakni Ketuhanan menurut adab perikemanusiaan, kebangsaan yang berdasarkan pada perikemanusiaan, kedaulatan rakyat yang memperingati asas perikemanusiaan, keadilan sosial yang sesuai dengan tuntutan adab perikemanusiaan serta keluhuran hidup perikemanusiaan yang merupakan pangkal-induknya<sup>29</sup>, maka perikemanusiaan ini dapat dikaitkan dengan pandangan Kohlberg yakni hormat kepada sesama yang diekspresikan dalam dua prinsip keadilan dan kebaikan yang universal dan reversibel.

Konsekuensi logis dari keadilan Kohlberg ini menuntut kita bisa menempatkan diri memberikan kebebasan beragama, pergumulan iman seseorang berhadapan dengan keberadaan Tuhan, pindah agama atau ia justru dapat naik pada kedewasaan sebagai bagian dari perkembangan imannya. Karena kepercayaan kepada Ketuhanan yang Maha Esa dengan didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab-lah kita memberikan kebebasan beragama tersebut. Ini mirip dengan pernyataan Sir Muhammad Zafrullah Khan bahwa Al-Qur'an tidak mengutuk ketiadaan iman melainkan kemunafikan serta agama Islam adalah agama misi, ia berjuang untuk membujuk manusia mengubah keyakinan dan cara hidup yang diajarkannya. Karena itu agama ini juga mengakui hak berpindah agama yang sama bagi agama lain.<sup>30</sup>

---

28 Kohlberg and Power, "Moral Development, Religious Thinking, and the Question of a Seventh Stage." h. 336

29 Ki Hajar Dewantara, *Pantjasila* (Jogja: NV Usaha Penerbitan Indonesia, 1950). h. 8

30 Sir Muhammad Zafrullah Khan sebagaimana dikemukakan oleh Linde Lindkvist dalam *Religious Freedom and the Universal Declaration of Human Rights, Human Rights in History* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017). h. 64

Pengertian sila kedua dapat diterjemahkan sebagai hak asasi manusia yang diakui bagi seluruh umat manusia di dunia. Sementara pengertian sila ketiga, persatuan Indonesia mewujudkan inklusi moral sehingga semua yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama sebagai satu kesatuan komunitas moral. Bahkan inklusi moral kebangsaan Sukarno tidak berlawanan dengan kemanusiaan universal ketika ia menyatakan, karena ia seorang nasionalis, maka ia cinta bangsanya tetapi juga cinta kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian slogan NKRI harga mati dibatasi pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Keanekaragaman suku dan budaya Indonesia diakui sebagai kekayaan Indonesia dan kreativitas menanggapi lingkungan hidupnya.

Sila keempat yang dipimpin oleh hikmat bijaksana termasuk mencakup pada pertimbangan moral tahap 6 yang berdasarkan prinsip keadilan dan kebaikan universal. Sukarno sendiri menunjukkan dalam pidatonya di sidang umum PBB bahwa demokrasi Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat (*uananimity arising out of deliberation*) dan ini melalui perwakilan. Sementara sila kelima, konsep sama rata (*equality*) ternyata diimbangi dengan sama rasa (*equity*) yang muncul pada tingkat pascakonvensional Kohlberg. Pada tingkat ini, ada kewajiban untuk mempertimbangkan posisi kelompok yang paling tidak diuntungkan atau tertinggal berdasarkan prinsip keadilan yang universal dan reversibel.

## 6. Metode Pendidikan Moral Pancasila

Bercermin pada penelitian Kohlberg, kita melihat peran komunitas atau rekan siswa/ mahasiswa sangat berpengaruh pada tindakan moral siswa atau peserta didik, bahkan terkadang lebih besar daripada orang tua ataupun dosen atau guru. Kohlberg dan Durkheim mengakui peranan komunitas sekolah untuk menghadirkan motivasi eksternal melalui rekan mahasiswa lainnya bersama-sama, mendorong partisipasi dan tanggung jawab bersama.

Melalui modifikasi komunitas adil dan peduli Kohlberg, generasi muda Indonesia perlu dilibatkan partisipasinya dalam Komunitas Pancasila yang merupakan komunitas adil dan peduli

berdasarkan moral Pancasila yang berdasarkan gotong royong. Suasana moral yang berdasarkan moral Pancasila yang universal dan reversibel sebagai kesepakatan bersama dan mampu menaungi pelbagai suku, gender, agama dan budaya yang berbeda merupakan sesuatu yang penting. Suasana moral sekolah perlu menampilkan lingkungan inklusif dengan menghadirkan berbagai suku, agama dan budaya yang berbeda sesuai dengan kenyataan riil di Indonesia. Jika ternyata universitas masih homogen, maka tugas kunjungan atau mengundang yang berbeda atau tinggal (*live-in*) pada lingkungan atau agama yang berbeda membantu mengembangkan perspektif sosial peserta didik. Sila keempat langsung diterapkan dalam pelbagai kebijakan atau pengambilan keputusan bersama oleh peserta didik. Keterlibatan mahasiswa dalam Komunitas Pancasila dapat berbentuk pembelajaran berbasis proyek untuk memberikan solusi terkait permasalahan di sekitarnya.

Contoh keteladanan tokoh-tokoh dalam sejarah Indonesia seperti yang dilakukan Yudi Latief dalam bukunya "Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan" merupakan usaha yang sangat baik di tengah krisis contoh keteladanan moral kita. Namun sebaliknya, pemilihan tokoh pahlawan nasional tidak selalu berbanding lurus dengan keteladanan moral. Tokoh-tokoh yang melawan kemanusiaan tidak akan membantu peserta didik untuk terdorong naik pada tahapan moral yang lebih tinggi, sama seperti penghormatan seorang Eichmann terhadap tokoh Hitler melahirkan ketaatan untuk menindas kemanusiaan. Tampaknya, tokoh perlu dievaluasi secara kritis dan berimbang, agar peserta didik dapat melihat kekuatan dan kelemahan tokoh tersebut.

Pendekatan diskusi dilema moral sangat penting dilakukan dalam pembelajaran moral Pancasila. Di Indonesia, bahan yang dapat diangkat dalam diskusi dilema moral melimpah. Maka sangat disayangkan jika dalam perguruan tinggi, pelbagai permasalahan moral sehari-hari di Indonesia tidak melibatkan partisipasi mahasiswa untuk mengkritisi dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Dosen sebagai fasilitator dengan metode Sokrates bisa mengajukan pelbagai pertanyaan kritis untuk

didiskusikan bersama dalam kelas. Kebebasan menyampaikan pendapat dan tetap didasarkan pada hormat terhadap sesama dan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar diskusi bersama. Pertukaran peran atau kaidah emas diterapkan dalam diskusi kelas agar didapat solusi yang adil dan berkebaikan bagi semua.

## 7. Keraguan Universalitas Moral Barat dan Timur

Bagaimana menjelaskan universalitas prinsip moral Kohlberg dan tahapan moralnya, padahal teorinya berangkat dari teori-teori Barat dan ideologi Barat seperti Platonisme, Utilitarianisme, Etika Deontologis Kant, Liberalisme John Rawls, ataupun teori etika R.M. Hare dan lainnya? Pertama, Kohlberg akan menjawab seperti perumpamaan teori ilmiah dan konsep metode ilmiah sesudah abad pertengahan, yang mungkin secara historis dapat dituduh ciptaan Barat, namun tidak berarti teori tersebut tidak valid. Demikian juga prinsip moral walau berasal dari pemikiran Barat, tidak berarti prinsip itu tidak universal.

Kedua, ketika keadilan Kohlberg yang dianggap terlalu Barat, Swidler menunjukkan kepada kita betapa luasnya kaidah emas (*golden rule*) dapat ditemukan di banyak agama di dunia dengan pelbagai ekspresi dan bentuknya, yang juga sudah disadari oleh Kohlberg sebelumnya walau tidak selengkap daftar dari Swidler<sup>31</sup>.

Ketiga, budaya yang berbeda tidak selalu menghasilkan kode moral yang berbeda seperti yang ditunjukkan James Rachels atas kisah Herodotus: bahwa orang Callatia yang memakan jenazah orang tuanya yang meninggal atau orang Yunani yang membakar jenazah orang tuanya menunjukkan kode moral yang sama yakni hormat kepada orang tuanya yang sudah meninggal<sup>32</sup>.

Franz Magnis Suseno menyatakan perbedaan-perbedaan etika Jawa dan "Barat" betapa pun mendalam, namun tidak berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang berbeda.<sup>33</sup> Konsep keselarasan dalam Jawa

31 Leonard Swidler, "Toward a Universal Declaration of a Global Ethic," *Journal for the Study of Religions and Ideologies* 7 (March 1, 2004). h. 33-35

32 James Rachels, *Filsafat Moral*, trans. A. Sudiarja (McGraw-Hill Companies, Inc; Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004). h.42-43

33 Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa* (Gramedia, 1993). h. 230

dapat dimaknai sebagai kebaikan untuk keseluruhan atau keadilan bagi keseluruhan.

Sementara menurut Magnis-Suseno, etika Jawa secara keseluruhan mirip dengan tahapan ketiga dari Kohlberg tetapi tidak memuat unsur-unsur tahapan keempat dan kelima Kohlberg, walau ia terbuka untuk menumbuhkan kesadaran moral tahap keenam<sup>34</sup>. Untuk itu, melalui formulasi akhir tahap dari Kohlberg yang memisahkan tipe A (heteronom) dan tipe B (otonom) dapat menjawab persoalan itu. Dapat diduga, dalam etika Jawa, kecenderungannya akan berlanjut pada tahap 4A (heteronom) karena ketaatannya pada otoritas pimpinan atau orang yang dituakan serta keselarasannya pada komunitas, baru ia naik pada tingkat pascakonvensional. Namun, jika masyarakat Jawa itu pada pedesaan dan cenderung homogen, penelitian Kohlberg menunjukkan penduduk desa tidak membutuhkan aspek yuridis abstrak ataupun internasional untuk mengatasi pelbagai komunitas yang berbeda sehingga tidak membutuhkan tahapan perkembangan moral berikutnya.

Penelitian John C. Gibbs, Karen S. Basinger, Rebecca L. Grime, John R. Snarey terhadap total kepada 42 negara menyimpulkan bahwa Kohlberg pada prinsipnya benar mengenai universalitas pengembangan penilaian moral dasar, nilai-nilai moral, dan proses pengambilan perspektif sosial terkait lintas budaya. Perkembangan moral tidak sepenuhnya relatif terhadap budaya dan praktik sosialisasi tertentu. Namun terdapat area kontroversi dan inkonsistensi yang terdapat pada tingkat pascakonvensional, walau ini juga dapat dilihat sebagai peluang bagi penelitian sistematis lebih lanjut terutama dalam penelitian komparatif dengan melibatkan perspektif sosial dan teori proses perkembangan sosial.<sup>35</sup>

---

34 Magnis-Suseno. h. 236

35 John Gibbs et al., "Moral Judgment Development Across Cultures: Revisiting Kohlberg's Universality Claims," *Developmental Review* 27 (December 1, 2007): 443–500, <https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.04.001>. h. 491

## 8. Bias Jender dan Kurangnya Perhatian terhadap Dimensi Afektif

Kritik Carol Gilligan pada teori Kohlberg dapat diringkas bahwa pertama, Kohlberg dan pendukungnya gagal melihat suara lain yakni pada *ethic of care* dibandingkan *ethic of justice*. Kedua, tahapan perkembangan moral Kohlberg kemungkinan *gender bias* karena subjek penelitian longitudinalnya selama dua puluh tahun adalah 84 anak laki-laki, sementara permainan anak-anak perempuan lebih mengedepankan bergantian, kompetisi tidak secara langsung, serta permainan sebagai kelanjutan hubungan (*relationship*). Anak perempuan bisa mengorbankan permainan itu sendiri demi relasi atau persaudaraan sementara anak-anak laki-laki memperhatikan aturan<sup>36</sup>.

Kohlberg menanggapi kritik Gilligan dengan dua cara. Pertama, tidak seperti Freud atau Piaget, ia tidak pernah menyatakan bahwa laki-laki memiliki perkembangan moral akan keadilan lebih baik dibandingkan perempuan. Dalam penelitiannya, Kohlberg menunjukkan mengapa beberapa responden perempuan kurang berkembang tahapan keadilannya, yaitu karena responden tidak terjun dalam dua institusi masyarakat yang kompleks yakni pendidikan dan tanggung jawab kerja dalam masyarakat yang lebih kompleks. Tentu temuan ini juga terjadi pada laki-laki dengan latar belakang yang sama<sup>37</sup>. Kedua, Kohlberg menyatakan sebagian besar setuju dengan pandangan Gilligan terkait pentingnya orientasi kepedulian (*care*) dan memperbaiki juga *standard issue scoring system*-nya dengan membedakan sosiomoral dalam penentuan tahapan moral<sup>38</sup>.

Penelitian yang dilakukan Higgins, Power dan Kohlberg (1984) justru menunjukkan dua konsiderasi keadilan dan tanggung jawab ini digunakan bersama-sama baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Artinya ternyata perempuan juga tidak kalah adilnya dibandingkan pria, sementara pria tidak kalah tanggung jawabnya dibandingkan perempuan. Kohlberg juga mencontohkan pendekatan komunitas adilnya (*just community*) senantiasa mempertimbangkan

---

36 Carol Gilligan, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, 1982 32nd printing (Harvard University Press, 1993). h. 10, 16

37 Kohlberg, *The Philosophy of Moral Development*. h. 340

38 Kohlberg, *The Psychology of Moral Development*. h.343

kepedulian dan tanggung jawab dalam menyelesaikan konflik hak-hak. Seperti yang kita ketahui, tahap 6 Kohlberg sudah mengintegrasikan keadilan dan kebaikan sebagai satu kesatuan prinsip universal sebagai bagian dari hormat terhadap sesama.

## 9. Kritik Terhadap Pendidikan Moral Kohlberg

Kritik pertama terhadap Pendidikan Moral Kohlberg dapat diangkat di sini, misalnya kritik yang dikemukakan oleh James Leming. Dalam kritiknya, Leming menunjukkan pendekatan dilema moral tidak mengubah perilaku siswa yang mereka butuhkan sehari-hari dan kenaikan tahapan moral dalam satu semester dinilai kecil. Sementara itu pendidikan komunitas adil Kohlberg, menurut Leming memang berhasil mengatasi permasalahan perilaku siswa sehari-hari namun pendekatan ini tampak tidak praktis bagi banyak praktisi sekolah.<sup>39</sup>

Tampak walau kenaikan diskusi dilema moral dinilai kecil namun kita sadari ia juga membantu nalar kritis peserta didik yang dibutuhkan dalam menentukan benar salah secara moral kelak ketika ia menjadi pemimpin. Sementara jika pendekatan komunitas adil Kohlberg tidak dimungkinkan, beberapa prinsip dari pendekatan komunitas itu dapat dilakukan dengan modifikasi untuk tetap mendapatkan perubahan perilaku siswa, mendorong solidaritas dan motivasi dalam menyelesaikan masalah di sekitarnya berdasarkan moral Pancasila yang universal dan reversibel.

Sementara kerumitan pengukuran tahapan moral memang menjadi kendala tersendiri. Beberapa alat ukur survei yang dikembangkan James Rest tahun 1974, *The Defining Issues Test* (DIT) dan juga pengukuran *School Moral Atmosphere Questionnaire* (SMAQ) yang dikembangkan Høst, Brugman, Tevecchio, & Bremm tahun 1998 dapat menjadi alternatif walau tidak sedetail penggunaan wawancara seperti yang dilakukan Kohlberg.

---

39 James S. Leming, "Research and Practise in Moral and Character Education: Loosely Coupled Phenomena," in *Handbook of Moral and Character Education*, ed. Larry P. Nucci and Darcia Narvaez (New York: Taylor & Francis, 2008). h. 144-145

Kritik kedua terhadap Pendidikan Moral Kohlberg diajukan oleh Liu Xian Dong. Liu menganggap karena Kohlberg tidak ingin terjebak dalam apa yang disebut keranjang keutamaan (*bag of virtues*), ia mengabaikan pendidikan karakter yang berdasarkan keutamaan dan lebih mengutamakan pendidikan pertimbangan moral. Padahal Liu merasa kedua kekuatan ini perlu saling melengkapi secara bersama-sama.<sup>40</sup>

Apa yang dikhawatirkan Liu adalah tepat merupakan kekurangan Kohlberg. Samuel P. Oliner dan Pearl M. Oliner melakukan penelitian terhadap orang-orang yang menolong tanpa pamrih terhadap para korban Yahudi, ketika Hitler masih berkuasa. Artinya mereka berhadapan dengan risiko berat jika ketahuan menolong para Yahudi, karena sebenarnya ini melawan hukum saat itu. Namun menariknya, walau ini membahayakan mereka sendiri, mereka menemukan adanya anak-anak muda yang menolong para Yahudi, juga beberapa orang dewasa yang mungkin menurut ukuran tahapan moral Kohlberg, mereka belum dewasa.<sup>41</sup>

Para penolong itu tidak merasa dirinya sebagai pahlawan. Mereka hanya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak merencanakan apa yang mereka lakukan, dan kita melihat ini terjadi karena karakter baik yang merupakan pembiasaan dari keluarganya. Umumnya keluarga mereka mengajarkan mereka untuk selalu menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Atau penolong lain mengatakan, saya Kristen yang taat, dan saya melakukan itu karena Tuhan ingin saya melakukan yang baik<sup>42</sup>. Juga penolong lain bercerita kakeknya ketika membaca Alkitab selalu mengundang siapa saja, baik Yahudi ataupun Katolik diterima dengan baik.<sup>43</sup>

---

40 Xiangdong Liu, "The Problem of Character Education and Kohlberg's Moral Education: Critique from Dewey's Moral Deliberation," *Philosophical Studies in Education* 45 (2014): 136–45.

41 Samuel P. Oliner and Pearl M. Oliner, *The Altruistic Personality: Rescuers of Jews in Nazi Europe* (The Free Press, 1988). h. 44

42 Oliner and Oliner. h. 374

43 Oliner and Oliner. h. 375

Tampaknya pembiasaan moral yang dilakukan pendidikan karakter berdasarkan keutamaan, tidak dapat diabaikan. Rupanya dalam budaya moral yang buruk sekalipun, ada orang-orang yang belum dewasa secara tahapan moral Kohlberg tetapi tetap dapat melakukan tindakan moral yang baik akibat pembiasaan moral yang dilakukan sebelumnya. Namun, pertanyaan Kohlberg tetap berlaku yakni pembiasaan moral berdasarkan apa? Akankah ini kembali pada keranjang keutamaan (*bag of virtues*) yang pernah dikritik Kohlberg, bersifat relatif dan acak, jika tidak didasarkan pada prinsip keadilan dan kebaikan yang universal dan reversibel? Karena itu pendekatan pendidikan karakter berdasarkan keutamaan tetap perlu dilengkapi dengan pertimbangan moral Kohlberg.

#### 10. Beberapa keterbatasan penerapan metode Kohlberg dalam Pendidikan Moral Pancasila

Ada beberapa keterbatasan pendidikan Moral Kohlberg jika diterapkan dalam Pendidikan Moral Pancasila. Pertama, perlu adanya modifikasi pendidikan moral Kohlberg sesuai konteks Indonesia. Sebagai contoh, untuk Komunitas Pancasila, jika suasana moral tidak bisa diterapkan pada satu sekolah seperti Kohlberg, setidaknya bisa diterapkan pada satu kelas atau komunitas kelas yang berdasarkan Pancasila yang berdasarkan prinsip keadilan dan kebaikan secara universal dan reversibel.

Sementara untuk diskusi dilema moral, terbaik dilakukan secara luring untuk interaksi yang lebih intens. Baik diskusi dilema moral dilakukan secara daring (*online*) ataupun luring (*offline*), pendidik perlu mempertimbangkan kenyamanan dan keamanan peserta diskusi untuk berinteraksi aktif dalam diskusi dilema moral untuk menemukan solusi.

Untuk pendekatan keteladanan moral, kita berhadapan dengan daftar pahlawan nasional atau tokoh pemimpin di Indonesia yang tidak semuanya memenuhi kriteria keteladanan moral. Untuk itu, dosen perlu mendorong nalar kritis mahasiswa untuk dapat menimbang baik buruknya tokoh berdasarkan prinsip kebaikan dan keadilan yang universal dan reversibel.

Kedua, keterbatasan lainnya terkait dengan tidak tersedianya pengukuran tahapan moral, dengan konteks Indonesia dan terjemahannya. Hal ini bisa diatasi sementara dengan memperkirakan tahapan moral peserta didik untuk mendiskusikan beberapa masalah dilema moral yang sesuai dengan tahapannya. Diskusi mana rumusan Pancasila yang lebih baik, apakah yang rumusan saat ini atau Piagam Jakarta, membutuhkan peserta yang sudah mencapai tahap 4 untuk ke tingkatan pascakonvensional.

Keterbatasan ketiga, pendidikan moral Pancasila sendiri tidak seharusnya terbatas pada tiga model pendidikan Kohlberg saja. Beberapa pembiasaan moral berdasarkan teori keutamaan dan pendidikan afeksi bahkan penggunaan lagu-lagu kebangsaan dalam pendidikan Pancasila, dapat melengkapi penerapan pendidikan moral Pancasila berdasarkan Kohlberg ini.

### **Kesimpulan dan Kontribusi Keilmuan**

Beberapa kesimpulan :

1. Terkait dengan keraguan universalitas Moral Barat dan Timur, tetap dapat disimpulkan Kohlberg pada prinsipnya benar mengenai universalitas perkembangan moralnya, juga nilai keadilan dan kebaikan adalah universal lintas budaya. Walau Timur tidak mengenal filsuf Plato, Kant, Rawls dan lainnya, adanya kaidah emas dalam pelbagai agama dan budaya memungkinkan prinsip moral yang universal dan reversibel. Dengan demikian, kontribusi dari berbagai agama dan budaya dimungkinkan walau sebaliknya melalui prinsip keadilan dan kebaikan universal dan reversibel, budaya dan praktek ajaran agama tertentu tetap dapat dikritik secara moral.
2. Terkait *gender bias* dan kurangnya perhatian pada dimensi afeksi, teori perkembangan moral Kohlberg menunjukkan pengakuannya terhadap kepedulian (*care*) dan memasukkannya dalam *Standard Issues Scoring Manual* serta mengenali unsur afeksi dalam pertimbangan moral. Kohlberg dan rekan-rekannya menunjukkan justru dalam

hasil penilaiannya perempuan tidak kalah adilnya dibandingkan laki-laki, sebaliknya laki-laki tidak lebih bertanggung jawabnya dibandingkan perempuan sejauh keduanya datang dari latar belakang sosial dan pendidikan yang sama. Namun terkait afeksi dan perkembangan empati, pendekatan teori Kohlberg tidaklah detail dalam aspek ini, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Martin L. Hoffman.

3. Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, walau bukan merupakan teori baru dan cukup mendapatkan banyak kritik terhadap keterbatasannya tetapi di tengah konteks Indonesia saat ini, teori ini masih tetap relevan dan memberikan sumbangsih yang berharga bagi interpretasi Pancasila yang berdasarkan prinsip keadilan dan kebaikan yang universal dan reversibel. Teori ini juga berhasil menunjukkan kontribusinya bagi pemaknaan moral Pancasila yang universal dan reversibel, menghindari relativisme moral dalam menafsir dan memahami Pancasila.
4. Pendidikan moral Pancasila selama ini didekati melalui pendidikan karakter berdasarkan teori keutamaan. Melalui tiga metode pendidikan moral Kohlberg, pendidikan moral Pancasila mendapatkan pendekatan lain yang mendorong kedewasaan tahapan moral, demokratis dan nalar kritis dengan tetap berdasarkan prinsip keadilan dan kebaikan yang universal dan reversibel.
5. Keteladanan moral Kohlberg mengatasi relativisme karakter tokoh melalui pemilihan tokoh yang sedapat mungkin mencerminkan tahap 6 Kohlberg dan menilai tokoh berdasarkan prinsip keadilan dan kebaikan yang universal dan reversibel.
6. Pendidikan dilema moral pada Pancasila dapat mendorong nalar kritis dan pertumbuhan tahapan moral peserta didik terhadap permasalahan dilema moral di sekitar kita untuk terlibat dan memikirkan solusi bagi permasalahan di Indonesia.

7. Pendidikan komunitas Pancasila mengingatkan pentingnya suasana moral yang harus diletakkan pada moral Pancasila yang universal dan reversibel, mengingat kekuatan komunitas dapat saja dibawa kepada komunitas yang tidak adil karena suasana moral yang buruk atau tidak didasarkan pada prinsip keadilan dan kebaikan yang universal dan reversibel.
8. Teori perkembangan moral Kohlberg terutama hubungan antara agama dan moral memberikan kesempatan agama dan budaya berkontribusi bagi perkembangan moral Pancasila sejauh ia didasarkan pada keadilan dan kebaikan yang universal dan reversibel, tanpa mereduksi moral pada agama atau pendidikan moral Pancasila pada pendidikan agama semata.

Kontribusi keilmuan yang diberikan penulis:

1. Memaknai Pancasila berdasarkan keadilan yang universal dan reversibel dari Kohlberg, selaras dengan tawaran Pancasila oleh Sukarno bagi dunia di depan sidang umum PBB. Dengan cara ini, maka rumusan Pancasila yang ada sekarang dapat ditunjukkan lebih universal dan reversibel daripada rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta, dengan implikasi pemaknaan pada syarat menjadi presiden dalam UUD 1945. Jika selama ini dalam sejarah sering disebutkan adanya pertentangan golongan kebangsaan dan golongan Islam dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), maka bercermin pada Kohlberg, pertentangan ide tersebut dapat dilihat sebagai pertentangan tingkatan perkembangan moral yang berbeda, antara yang sudah pascakonvensional dengan tingkat konvensional atau bahkan prakonvensional.
2. Menawarkan hubungan agama dan moral Pancasila berdasarkan tahap 7 metaforis dari Kohlberg yang juga sesuai dengan "dibedakan tetapi tidak terpisah" atau dengan istilah José Casanova sebagai sekularisasi sebagai diferensiasi (*secularization as differentiation*) dan menolak sekularisasi

dengan mundurnya agama (*secularization as religious decline*) dan sekularisasi sebagai privatisasi agama (*secularization as privatization*). Namun, kontribusi agama dan kepercayaan justru diharapkan dalam moral yang universal dan reversibel sehingga dapat menampilkan keadilan dan kebaikan yang universal, lintas agama dan golongan sesuai dengan klaim agama sendiri yang membawa keadilan dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Sebaliknya, moral universal dan reversibel ini dapat mengkritisi pelbagai ajaran agama yang melanggarnya. Dengan demikian, moral Pancasila tidak direduksi pada pelajaran agama atau agama semata.

3. Melengkapi pendidikan moral Pancasila selama ini yang cenderung lebih pada etika keutamaan, melalui keteladanan moral yang kritis dalam memilih tokoh teladan, diskusi dilema moral yang mendorong nalar kritis dan sekaligus menawarkan solusi pada permasalahan, serta komunitas Pancasila yang merupakan komunitas adil dan peduli yang kesemuanya didasarkan pada moral Pancasila yang universal dan reversibel.

### **Alur Baru**

Karena disertasi ini masih terbatas pada sumbangsih Pendidikan Moral Kohlberg bagi Pendidikan Moral Pancasila, ada beberapa peluang yang dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut:

1. Lawrence Kohlberg dan Ki Hajar Dewantara memiliki perhatian yang sama dalam pendidikan moral dan keduanya juga memperhatikan adanya tahapan perkembangan anak/dewasa serta terbuka pada nilai-nilai budaya. Ini merupakan peluang untuk dikembangkan lebih lanjut dalam mewujudkan lebih jauh pendidikan Pancasila yang menjadi khas Indonesia. Dengan budaya Indonesia yang beraneka ragam, maka selalu akan terdapat pemahaman yang jauh lebih komprehensif terkait prinsip yang mana yang universal dan reversibel walau perwujudannya dalam budaya berbeda. Dengan kekayaan

suku, bahasa dan budaya yang berbeda, penelitian dalam bidang-bidang ini dapat menjadi sumbangan besar dalam pemahaman moral dari perspektif Indonesia.

2. Ahmad Syafii Maarif sendiri menganggap jika saja Sukarno tidak membubarkan konstituante dan mengeluarkan dekrit Presiden, jika mungkin mau bersabar dengan proses tersebut, mungkin wakil-wakil Islam akan berhasil memberikan kontribusi yang berarti dalam melahirkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Demikian agama-agama dan pelbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, sebenarnya memiliki peluang mengungkapkan moral universalnya dengan bahasanya yang khas. Juga hadir peluang melahirkan kasus-kasus yang khas, seperti kasus Heinz dalam dilema moral Kohlberg dengan dilema terkait budaya atau kepercayaannya sendiri terhadap keadilan universal. Agama-agama dan budaya juga berpeluang menceritakan para tokoh yang berketeladanan moral, mereka yang berada pada tahap 6 untuk menginspirasi masyarakat lainnya.
3. Diakui Kohlberg, walau ia melihat pentingnya dimensi afektif, penggalian untuk aspek ini dalam Kohlberg tidaklah detail. Penelitian lebih lanjut sudah dilakukan Martin L. Hoffman, Carol Giligan dan Nel Noddings. Namun, tampak perlu dipikirkan bagaimana jika itu diterapkan juga dalam pendidikan Moral Pancasila. Disadari, pendidikan moral Komunitas Adil dari Kohlberg berhasil menyertakan masalah motivasi dan afeksi dalam komunitas adil. Namun tetap dibutuhkan penelitian secara detail penerapan perkembangan empati dari Hoffman misalnya, dalam Pendidikan Moral Pancasila.
4. Penelitian ini masih berfokus pada kajian teoritis-konseptual. Karena itu, kajian yang memakai pendekatan empiris terhadap pendidikan moral Pancasila, akan menjadi peluang untuk penelitian lebih lanjut, juga jika pendidikan itu dilakukan secara daring (*online*) ataupun menggunakan kecerdasan tiruan.

## **Ucapan Terima Kasih**

Sekitar tahun 1957, mama saya Yustin Tjong mendapatkan kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa karena ia dianggap murid yang cerdas. Namun, ia memutuskan tidak mengambil kesempatan itu karena adik-adiknya masih kecil. Ia lebih memilih bekerja menjadi guru dan juga membantu ekonomi keluarga dan adik-adiknya. Maka pertama-tama puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan dan juga ucapan terima kasih kepada orang tua yakni Tjung Muk Sen yang pada masa Orde Baru harus mengganti namanya menjadi Hasan dan Yustin Tjong. Mereka adalah orang tua yang mengusahakan agar semua anak-anaknya dapat bersekolah dengan baik. Bersekolah atau melanjutkan studi itu adalah kesempatan luar biasa dan sering di belakang itu menuntut banyak pengorbanan dari orang lain.

Berikutnya ucapan terima kasih diberikan kepada Yolanda Herawati, isteriku yang bersedia ditinggal sendiri mengurus anak-anak selama kuliah, dan tugas rumah tangga yang sebenarnya lebih melelahkan daripada disertasi. Ia hanya percaya saja bahwa apa yang dilakukan suaminya itu dapat berguna bagi generasi muda di Indonesia. Semoga apa yang digumuli dalam disertasi ini memang benar-benar berguna bagi generasi muda Indonesia. Terima kasih tentu diberikan kepada dukungan dari segenap keluarga Tjung dan juga keluarga besar Tjia yang mendukung dengan pelbagai cara.

Ketika saya masih bekerja di Pusat Data Bisnis Indonesia, saya ternyata diizinkan pimpinan saya saat itu, Christianto Wibisono untuk bekerja paruh waktu dan sambil kuliah S2 Filsafat di Universitas Indonesia. Kejadian ini kembali berulang. Ketika saya bekerja di Universitas Ciputra, saya kembali diizinkan mengambil S3 Filsafat di STF Driyarkara di Jakarta dan mendapat dukungan penuh dari Universitas Ciputra Surabaya. Maka perlu disebut di sini, ucapan terima kasih kepada Yohannes Somawiharja selaku Rektor Universitas Ciputra, segenap jajaran rektorat serta yayasan termasuk juga Antonius Tanan, Denny Bernardus bahkan Prof. Johannes Gerardus Nirbito, serta segenap rekan di Fakultas Entrepreneurship

dan Humaniora Universitas Ciputra dan Program Studi Teknologi Informasi yang juga tidak bisa disebutkan satu persatu di sini.

Ucapan terima kasih juga kepada Prof. Toeti Heraty alm. yang senang mendengar saya memilih melanjutkan studi S3 dalam filsafat. Beberapa tahun lalu, ketika Beliau mendengar saya mengambil topik disertasi terkait dengan Kohlberg dan Pancasila, ia menyebut Yudi Latief sebagai temannya dan menyatakan keinginannya hadir kelak dalam sidang promosiku. Tentu dapat disebut juga ucapan terima kasih pada Pdt. Andar Ismail yang senantiasa memberikan semangat agar menyelesaikan studi dan juga Pdt. Aiter yang sudah menyediakan tempatnya di Jakarta.

Untuk penelitian dan penulisan disertasi, ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada promotor saya, Prof. Dr. J. Sudarminta. Kesabaran dan ketelitiannya sangat luar biasa. Ia pembimbing hebat sekaligus guru keteladanan. Juga ucapan terima kasih diberikan adalah ko-promotor yakni Prof. Dr. A. Sudiarja dan Dr. Simon Petrus Lili Tjahjadi bersama penguji Dr. A. Widyarsono dan Dr. Mikhael Dua yang kesemuanya banyak memberikan masukan dan usulan-usulan perbaikan. Beberapa tahap ujian ini adalah proses penting untuk melihat kesalahan dan perbaikan tulisan disertasi. Mereka memberikan banyak perspektif yang berguna ketika menguji. Namun demikian, jika hingga saat ini masih juga ditemukan beberapa kesalahan dalam tulisan, itu tetap merupakan kesalahan dan tanggung jawab saya selaku penulis.

Akhirnya ucapan terima kasih diberikan kepada segenap dosen dan staf di STF Driyarkara. Terima kasih khusus kepada Dr. Karlina Supelli yang dulu pernah menjadi dosen S2 Filsafat saya di Universitas Indonesia, tetapi kemudian kembali menjadi dosen saya di S3 dan juga selaku Ketua Program Doktor STF Driyarkara dan sekaligus anggota penguji sidang promosi. Terima kasih juga perlu diberikan kepada Mbak Therisia Asih, Mbak Retno Tri Harjanti juga Pak Agus Setyono serta banyak rekan mahasiswa filsafat seperti Mbak Ruth Indiah Rahayu, Pak Rudy Setiawan, Pak Aldrich Anthonio dan rekan lain yang tidak dapat disebut satu persatu di sini. Suasana moral STF Driyarkara yang saling mendukung perlu kita

apresiasi bersama. Patut dicatat juga terima kasih kepada Nyai Novi Wulan dari Roemah Bhinneka yang karena kami senasib harus menyelesaikan S3 di ujung tahun penghabisan, kami saling memberikan semangat untuk terus menyelesaikan disertasi. Ternyata ia yang berhasil lulus ujian promosi lebih dulu. Sementara teman diskusi pada masa pandemi Covid melalui acara 'ngosipin Tionghoa' bersama Didi Kwartanada, Gus Aan dan rekan lainnya juga mengantar pada pemahaman baru terkait kebangsaan Indonesia.

### **Riwayat Hidup**

Johan Hasan adalah dosen di Universitas Ciputra Surabaya sejak tahun 2006. Lahir di Kotabumi, Lampung, 7 April 1970. Menyelesaikan studi S1 Teknik Komputernya di STMIK Budi Luhur (sekarang Universitas Budi Luhur) tahun 1994 dan menyelesaikan studi S2 Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia tahun 1999. Mengikuti *Kauffman Global Faculty Visitor* bulan Januari 2009 hingga Mei 2009 di Kansas City, Amerika Serikat atas dukungan Ciputra Foundation. Menjabat sebagai Dekan Fakultas Entrepreneurship dan Humaniora sejak Juni 2011 hingga Juni 2017 untuk melanjutkan studi S3 Filsafat di STF Driyarkara. Saat ini mengajar dalam mata kuliah Pancasila dan juga Etika di program studi Information Teknologi.

Beberapa publikasinya:

- Hasan, Johan. "Mempertimbangkan Pendekatan Prinsipisme dalam Entrepreneurship" In *Refleksi 30 Tahun HIDESE*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021
- Hasan, Johan. "Menuju Nasionalisme Indonesia yang Berkesetaraan" In. *Tionghoa Merajut Keindonesiaan. Persembahan 80 Tahun Leo Suryadinata*. Surabaya: Penerbit Universitas Ciputra, 2021.
- Hasan, Johan. "Sumbangsih Pemikiran James Fowler dalam Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Indonesia" *Respons:*

*Jurnal Etika Sosial*. Vol.23. No.02. (Desember 2018): h.185-204.

- Hasan, Johan "Era Pasca-kebenaran di Indonesia". Opini Kompas. 28 April 2018.
- "Tinjauan Etis Terhadap Hoax dalam Publikasi Artikel Ilmu Sosial" *Respons: Jurnal Etika Sosial*. Vol.22 No.02. (Desember 2017): h.249-265.

